

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Literature Reviu**

Karena tema penelitian ini merupakan isu seputar dampak Britain Exit terhadap perubahan aturan imigrasi bagi masyarakat Uni Eropa di Britania Raya serta pengaruhnya terhadap kerjasama ekonomi antar Britania Raya dan Uni Eropa, maka penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak benar-benar mutlak asli atau baru dihasilkan oleh penulis seorang. Penulis menyadari bahwa pentingnya melakukan perbandingan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema pada penelitian ini. Melalui *literature review* ini, penulis akan membandingkan penelitian terdahulu dan menunjukkan bahwa penelitian ini merupakan suatu penelitian lanjutan yang tentu memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu sekaligus menjadi sumber atau rujukan yang akan penulis kutip.

Pertama, Buku berjudul Brexit: **History, Reasoning and Perspectives 2018**, karya **David Ramiro Troitiño dan Tanel Kerikmäe**. Menjelaskan tentang Sejarah Britain Exit terjadi serta hal yang melatarbelakangi keputusan tersebut. Banyak masalah, yang perlu ditangani setelah inisiatif yang diambil oleh Inggris, terkait dengan keputusan-keputusan politik. Namun demikian, apapun keputusan politik yang akan dibuat, hak-hak dasar orang termasuk pekerja harus dihormati. Juga prinsip kepastian hukum, harapan yang sah dan supremasi hukum harus dihormati.

Kemudian, penelitian ini menjelaskan bagaimana keputusan keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa berpengaruh pada kebijakan luar negeri Britania Raya

sehingga teruraikan dampak seperti apa saja yang terjadi dari keputusan Brexit ini terhadap Uni Eropa dan Inggris. Perbedaan buku ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah, penulis lebih focus terhadap sejarah hubungan kawasan serta alasan-alasan yang mendasari masyarakat Britania Raya untuk setuju pada keputusan Brexit dan dampak yang diberikan setelahnya.

Kedua, Buku dari **Palgrave Studies in European Union Politics, 2018** berjudul **THE EU AFTER BREXIT** yang diterbitkan oleh Institutional and Policy Implications Congressional Research Service karya Francis B Jacobs. Menjelaskan tentang bagaimana dampak yang dirasakan oleh Uni Eropa pasca Brexit, dimana Uni Eropa menderita defisit demokrasi yakni salah satu persepsi kurangnya legitimasi demokratis. Hal ini dipandang lebih kecil dan asing daripada sistem pemerintahan nasional, regional atau local. Alasan lain yang telah diuraikan dalam tulisan ini, seperti: krisis ekonomi, migrasi internal dan eksternal, perpecahan internal dan kurangnya solidaritas antar negara-negara Uni Eropa yang menjadi alasan lemahnya dukungan warga untuk Uni Eropa.

Berangkat dari hal tersebut maka penelitian ini menganalisis bahwa akan ada bidang kebijakan di mana integrasi Uni Eropa yang lebih besar akan diperlukan dan memungkinkan beberapa *nation power* dikembalikan ke negara anggota sebagai wujud pertahanan kerjasama antar negara dengan kawasan yang sifatnya demokratis dan tetap mendukung pertumbuhan kesejahteraan kawasan.

Ketiga, Buku dari **Institute of Government** berjudul **Understanding the economic Impact of Brexit, 2018**. Karya Gemma Tetlow dan Alex Stojanovic. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana Brexit akan menyebabkan perubahan signifikan

dalam hubungan Inggris dengan negara-negara Eropa lainnya. Pada akhir 2018, anggota parlemen diharapkan diberi kesempatan untuk memberikan suara. Dimana hal ini merupakan salah satu faktor yang penting dalam membentuk opini anggota parlemen dan pemilih tentang manfaat dari setiap kesepakatan Brexit yang pada akhirnya berbicara tentang dampak Brexit terhadap perekonomian negara dengan kawasan tersebut. Oleh karena itu, sangat penting bagi politisi dan publik untuk memahami tentang hal-hal yang tidak diketahui tentang bagaimana Brexit dapat mempengaruhi ekonomi Britania Raya.

Penelitian ini merangkum banyak penelitian yang telah diterbitkan dan menetapkan berbagai proyeksi tentang bagaimana kemungkinan Brexit akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi Britania Raya dan dampaknya bagi Uni Eropa dalam jangka panjang (prediksi umumnya hingga 2030). Sebagian besar studi ini memprediksi bahwa ekonomi Britania Raya akan lebih kecil setelah Brexit daripada yang seharusnya. Hal ini berangkat dari sebagian besar penelitian yang memperkirakan bahwa Brexit akan meningkatkan hambatan perdagangan antara Britania Raya dan negara-negara lain dan di sana adalah kumpulan bukti ekonomi yang luas yang menunjukkan bahwa perdagangan yang lebih kuat, investasi dan hubungan migrasi di masa lalu antar negara telah dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

Memperkirakan bahwa pendapatan nasional Britania Raya bisa 4% lebih besar di 15 tahun, jika Britania Raya meninggalkan Uni Eropa dan secara sepihak mengadopsi perdagangan bebas sepenuhnya, dibandingkan jika Britania Raya tetap menjadi anggota Uni Eropa. Maka melalui literature tersebut skripsi ini akan

menelaah dampak mana yang muncul pasca Brexit melalui prediksi serta telaah yang telah dilakukan oleh para peneliti.

Keempat, Buku berjudul **Brexit and Migration dari European Parliament, 2018.**

Disusun oleh **Team Policy Department for Citizen's Rights and Constitutional Affairs.** Menjelaskan tentang kebijakan migrasi Uni Eropa dan Imigrasi Britania Raya pre dan pasca Brexit. Menjelaskan juga tentang prioritas pertama Uni Eropa terkait hak migrasi dan mobilitas dalam konteks Brexit dengan mengamankan hak yang dimiliki oleh warga negara Uni Eropa dan warga negara Britania Raya yang telah melakukan hak gerakan bebas dan menginvestasikan hidup mereka di wilayah pihak lain. Menjamin hak bekerja dan tinggal serta hak untuk non-diskriminasi atas dasar kebangsaan bagi warga negara Britania Raya dan warga negara Uni Eropa yang telah menggunakan kebebasan mereka dalam hak bergerak sesuai dengan hukum Uni Eropa. Selanjutnya menjelaskan tentang warga negara Britania Raya yang tinggal di Negara Anggota Uni Eropa akan terus menikmati gratis hak gerak selama mereka tiba dan mulai menggunakan hak gerak bebas sebelum berakhirnya masa transisi (1 Januari 2021).

Negosiasi tentang WDA (Withdrawal Agreement) merupakan kesepakatan yang diusulkan antara Uni Eropa dan Britania Raya untuk mengatur kelangsungan hak-hak negara dengan kawasan yang telah menggunakan hak gerak bebasnya. Dimana terdapat keputusan terkait beberapa hak imigran pre-Brexit akan hilang dan tidak akan dilindungi oleh WDA. Setelah Brexit, warga negara Britania Raya hanya akan memiliki hak untuk tinggal, bekerja, dan belajar di Negara Uni Eropa, dan tidak menikmati pergerakan bebas ke Negara Anggota lain di Uni Eropa.

Sedangkan di Uni Eropa setelah Brexit, warga negaranya dapat menegakkan hak-hak mereka dalam prosedur pengaduan, namun dengan otoritas Britania Raya yang independen, yang juga kompeten untuk memulai penyelidikan dan tindakan hukum. Hak warga negara yang dirujuk dalam WDA juga dapat diajukan ke pengadilan nasional. Hubungan masa depan Uni Eropa dan Britania Raya terkait mobilitas dan migrasi setelah akhir masa transisi (dengan asumsi bahwa WDA ditandatangani dan diratifikasi) dapat mengambil salah satu dari sejumlah bentuk kebijakan.

Kelima, Jurnal dari JEL Classifications: F22; J61; N34, 2016. Disusun oleh **Jonathan Portes**. Berjudul, **Immigration After Brexit**. Menjelaskan tentang spektrum pilihan untuk kebijakan imigrasi Britania Raya pasca Brexit secara meluas terhadap warga negara EEA dan non-EEA yang diselaraskan, dan tingkat pembatasan dari setiap system yang baru. Namun, hampir semua hasil keputusan serta perundingan yang masuk akal akan menghasilkan peningkatan beban peraturan pada bisnis; pengurangan arus baik pekerja tidak terampil maupun pekerja terampil; dan kekhawatiran akan peningkatan pekerjaan ilegal. Penelitian ini menyangkut pertanyaan yang dianggap kunci bagi pembuat kebijakan tentang cara meminimalkan dampak ekonomi yang timbulkan pasca Brexit bagi keduanya sekaligus menjawab tuntutan politik dalam negeri dalam peningkatan kontrol Britania Raya tanpa memusuhi mitra Uni Eropa agar tidak merugikan aspek-aspek kunci lainnya dari negosiasi.

## Perbandingan Penelitian

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	David Ramiro Troitiño, Tanel Kerikmäe	<b>History, Reasoning and Perspectives 2018</b>	Kesamaan penelitian ini menjelaskan bagaimana keputusan keluarannya Britania Raya dari Uni Eropa berpengaruh pada kebijakan luar negeri Britania Raya sehingga teruraikan dampak seperti apa saja yang terjadi dari keputusan Brexit ini terhadap Uni Eropa dan Inggris.	Perbedaan buku ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah, penulis lebih focus terhadap sejarah hubungan kawasan serta alasan-alasan yang mendasari masyarakat Britania Raya untuk setuju pada keputusan Brexit dan dampak yang diberikan setelahnya.

2	Francis B Jacobs	<b>THE EU AFTER BREXIT</b>	Kesamaan pada buku ini terletak pada akan ada bidang kebijakan di mana integrasi Uni Eropa yang lebih besar akan diperlukan dan memungkinkan beberapa <i>nation power</i> dikembalikan ke negara anggota sebagai wujud pertahanan kerjasama antar negara dengan kawasan yang sifatnya demokratis dan tetap mendukung pertumbuhan kesejahteraan kawasan.	Perbedaan terletak pada fokus penelitian penulis hanya pada kelanjutan kerjasama pada bidang ekonomi melalui imigrasi dan aturannya.
---	---------------------	------------------------------------	---	--

3	Gemma Tetlow dan Alex Stojanovic	<b>Understanding the economic Impact of Brexit</b>	Penelitian dan buku ini memiliki persamaan membahas dampak ekonomi dari Britain Exit baik di Britania Raya maupun Uni Eropa.	Penelitian dan buku ini sama-sama merangkum banyak penelitian yang telah diterbitkan dan menetapkan berbagai proyeksi tentang bagaimana kemungkinan Brexit akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi Britania Raya dan dampaknya bagi Uni Eropa dalam jangka panjang (prediksi umumnya hingga 2030).
---	----------------------------------	--	--	---

4	Team Policy Department for Citizen's Rights and Constitutional Affairs.	<b>Brexit and Migration</b>	Penelitian dan buku ini berbicara tentang kebijakan migrasi Uni Eropa dan Imigrasi Britania Raya pre dan pasca Brexit serta membahas tentang Withdrawal Agreement.	Perbedaan buku Brexit and Migration dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti terletak pada penelitian ini tidak membahas lebih jauh tentang prioritas Uni Eropa terhadap migrasi.
5	<b>Jonathan Portes</b>	<b>Immigration After Brexit</b>	Buku dan penelitian ini memiliki sama-sama menjelaskan tentang spektrum pilihan untuk kebijakan imigrasi Britania Raya pasca Brexit secara	Perbedaan penelitian ini dengan buku Immigration After Brexit penelitian ini tidak berfokus hasil keputusan serta perundingan terkait kekhawatiran akan peningkatan

			<p>meluas terhadap warga negara EEA dan non-EEA yang diselaraskan, dan tingkat pembatasan dari setiap system yang baru. Namun, hampir semua hasil keputusan serta perundingan yang masuk akal akan menghasilkan peningkatan beban peraturan pada bisnis; pengurangan arus baik pekerja tidak terampil maupun pekerja terampil; dan</p>	<p>pekerjaan illegal yang dibahas di buku tersebut.</p>
--	--	--	--	---

			kekhawatiran akan peningkatan pekerjaan ilegal.	
--	--	--	--	--

## 2.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep yang dilandaskan pada penelitian dan dibuktikan melalui dukungan oleh data serta argumentasi yang sesuai. Teori juga dapat dikatakan sebagai gagasan yang dikumpulkan untuk dikemukakan dalam menjelaskan suatu peristiwa. Menurut Waltz, akademisi Hubungan Internasional akan sangat familiar dengan apa yang dinamakan teori. Waltz berpendapat tentang istilah teori yang digunakan secara bervariasi ini kerap kali digunakan sebagai rujukan karya-karya yang diawali dari sekadar deskripsi, yang seharusnya ditujukan untuk karya-karya yang memenuhi standar filsafat keilmuan (Dugis, 2016). Landasan Konseptual merupakan alat bantu yang memungkinkan dalam melakukan kegiatan deskripsi ataupun eksplanasi terhadap fenomena-fenomena yang ada pada hubungan internasional yang terjadi, landasan ini juga dianggap bisa menjadi kemampuan prediksi terhadap apa yang mungkin terjadi di kemudian hari.

### 1.2.1 Politik Luar Negeri

Hubungan kedaulatan-peran Britania Raya-Uni Eropa melibatkan peran substantif yang melibatkan ego pada negara dengan Kawasan tersebut. Melalui disahkannya keputusan Britain Exit, maka potensi peran politik luar negeri melalui kebijakan luar negeri Britania Raya akan semakin meluas melalui lebih banyaknya

kedaulatan yang diperoleh, dan seberapa baik Britania Raya mengelola kedaulatan negaranya. Di sini, kontestasi tersebut melibatkan aktor domestik yang mengedepankan konsepsi peran nasional yang berbeda tentang peran kebijakan luar negeri yang substantif (misalnya, negara netral, pemimpin global). Karena kedaulatan dengan cara ini menjadi bagian dari proses lokasi peran negara dan juga merupakan faktor penting dalam sosialisasi peran.

Masyarakat yang setuju terhadap Britain Exit berpendapat bahwa akan lebih banyak kedaulatan yang akan memberi Britania Raya kemerdekaan yang lebih besar untuk memainkan peran kebijakan luar negeri substantif lainnya. Pemerintah Britania Raya akan memainkan beberapa peran pasca-Brexit, termasuk kebijakan negara terhadap perdagangan global, kekuatan besar, pemimpin persemakmuran, dan sekutu setia Amerika Serikat. Masing-masing peran ini menawarkan peluang berbeda bagi Britania untuk menjalankan status kedaulatan pasca-Brexit dan masing-masing menekankan aspek kedaulatan yang agak berbeda dari sebelumnya saat Britania Raya masih menjadi bagian dari Uni Eropa. Hal ini dipenuhi oleh perlawanan dari aktor eksternal yang menantang gagasan bahwa kedaulatan mengizinkan pengejaran sepihak mereka dan melibatkan konflik antar peran karena tidak semua peran yang diberikan cocok satu sama lain, maksudnya disini adalah peran negara dengan peran kawasan sudah tidak pada tujuan yang sama lagi (Oppermann et al., 2020).

Politik Luar Negeri yang dilakukan oleh Britania Raya pasca Brexit juga tentu akan berimplikasi pada kebijakan pembaharuan imigrasi, hal ini berangkat dari aturan yang dilakukan Britania Raya dalam pembatasan izin tinggal warga negara asing dalam melakukan perjalanan bisnis maupun bekerja di Britania Raya. Kebijakan Luar Negeri yang berdaulat langsung dibawah kuasa Britania Raya tentu dapat diterapkan karena sekarang Britania Raya sudah secara penuh menjadi negara independent tanpa aturan Kawasan yang mengikat negara tersebut.

### **1.2.2 Ekonomi Politik Internasional**

Ekonomi Politik Internasional sebagai kerangka teoretis untuk refleksi tentang BREXIT dimana disiplin ekonomi politik bukanlah hal baru bagi hubungan internasional, untuk pertama kalinya istilah ini digunakan pada tahun 1615 oleh Antoine de Monchrétien. Ekonomi Politik Internasional dewasa ini meneliti hubungan antara teori ekonomi dan kebijakan yang dipraktikkan, atau efek dari keputusan politik praktis. Untuk ekonomi politik, sangat penting untuk memahami bagaimana fenomena ekonomi, sosial dan politik mempengaruhi keputusan negara maupun institusi. Secara umum, Menurut Gilpin (2001), ekonomi politik internasional umumnya memiliki tujuan untuk mencapai suatu manipulasi kekuatan pada pasar serta bagaimana cara meningkatkan power dan pengaruh terhadap negara lain. Ekonomi politik menerapkan metodologi ekonomi pada pengambilan keputusan manusia,

menjelaskan perilaku sosial melalui aparatus instrumen ekonomi.

Namun tidak hanya sampai disitu, ekonomi politik juga melacak dampak keputusan politik pada luasnya spektrum sosial dan ekonomi, termasuk tanggapan psikologis yang melandasinya. Hal ini berangkat dari keputusan dalam kondisi sumber daya yang terbatas, informasi asimetris, tentang alternatif penggunaan sumber daya yang ada.

Pada kasus ini, Brexit terkait sangat erat dengan perkembangan Uni Eropa, yakni dengan masa depan Uni dan Britania Raya. Ekonomi Politik Internasional Uni-Eropa menyebar pada kerangka yang luas mulai dari teori integrasi Eropa, pilihan publik, politik komparatif dan pendekatan pembuatan kebijakan (Talani, 2014). Ekonomi Internasional Brexit dihasilkan oleh isolasionisme tradisional Inggris, oleh keanggotaan non-euro Inggris sambil memiliki pusat keuangan lepas pantai (Thompson, 2017). Ekonomi politik kritis di pihak Inggris tumbuh karena ketakutan akan perkembangan pandangan yang tegas tentang integrasi antara arus utama imigrasi di Uni Eropa di Britania Raya.

Maka teori Ekonomi Politik ini menjadi relevan pada pendalaman langkah-langkah integrasi, pembangunan aparat kelembagaan yang kuat, mengambil alih banyak kekuasaan pemerintah nasional serta menjadi konstitusionalitas baru Eropa melalui perancangan aturan-aturan baru terkait kerjasama ekonomi maupun kebijakan imigrasi yang diperbaharui. Euroscepticism yang

kuat sebagai basis ekonomi politik kritis Inggris yang khas menjadi landasan penggunaan teori ini.

### **1.2.3 Regionalisme**

Dalam perkembangan ilmu Hubungan Internasional suatu hubungan interaksi antar negara dibutuhkan suatu wadah yang dapat menghimpun kerjasama didalam suatu wilayah dalam hal ini komunikasi hubungan internasional harus didasari oleh suatu landasan yang dapat menyatukan antar negara tersebut baik dalam hal geografis, budaya, sosial, maupun ekonomi. Geografis suatu negara mempengaruhi *national interest* (kepentingan nasional). Dalam hal ini proses politik memiliki tujuan integrasi dalam suatu kawasan yang pada akhirnya menjadikan regionalisme sebagai arah penghimpun negara-negara ini. Pasca perang dingin dalam setiap kawasan memiliki permasalahan baru dimana setelah mereka lepas dari negara blok barat ataupun blok timur negara kedua dan ketiga terjadi masalah baru yang sangat serius di antaranya adalah ekonomi, politik, kesejahteraan, dan lain sebagainya baik secara nasional maupun internasional yang dapat mempengaruhi transformasi sistem Internasional.

Edward D. Mansfield dan Helen Milner membagi regionalisme ke dalam dua jenis. Pertama, regionalisme yang didasarkan pada kedekatan geografis yang dapat diartikan sebagai adanya bentuk koordinasi atau kerja sama pada bidang ekonomi dan politik oleh negara-negara yang memiliki kedekatan secara

geografis.

Kedua, berdasarkan pada faktor non-geografis, yang diartikan sebagai suatu aktivitas pemerintah dan non-pemerintah. Kegiatannya berupa peningkatan level pada ekonomi serta aktivitas politik di antara negara-negara yang tidak berdekatan secara geografis (Kim et al., 2016).

Menurut Louis Cantori dan Steven Spiegel regionalisme adalah kawasan yang terdiri dari dua atau lebih negara, yang memiliki interaksi serta kedekatan geografis, kesamaan etnis, bahasa, budaya, keterkaitan sosial dan sejarah, serta menimbulkan perasaan identitas yang seringkali meningkat yang disebabkan oleh adanya aksi dan tindakan dari negara-negara yang ada diluar kawasan. Louis dan Steven membagi subordinate system kedalam tiga bagian, yakni: negara inti (core sector), negara pinggiran (peripheral sector), dan negara eksternal kawasan yang dapat berpartisipasi dalam interaksi kawasan (intrusive sector).

Proses regionalisme berlangsung dalam lima fase antara lain (Hettne & Söderbaum, 1999):

1. Regional Area
2. Regional Complex
3. Masyarakat
4. Masyarakat setempat
5. Negara bagian

Berdasarkan pada penjelasan teori regionalisme diatas,

penulis melihat bahwa Integrasi Regional berarti lebih dari kerja sama. berfokus pada pengurangan batas-batas dan pencampuran lebih dari dua negara dalam batas yang ditentukan lokasi geografis berdasarkan tujuan bersama untuk mencapai pasar tunggal, kebiasaan umum serikat pekerja, mata uang bersama, kebijakan dan aliansi pertahanan serupa, pergerakan bebas barang, jasa dan individu, tarif pasar umum, dll yang berlaku di Kawasan Uni Eropa.

#### **1.2.4 Imigrasi**

Komisi Keamanan Manusia dan Komisi Global Internasional Migrasi menyampaikan kritik dan perwasif terkait langkah-langkah imigrasi restriktif dalam upaya mengatasi migrasi tidak teratur, tetapi harus menanggapi penyebab yang mendasarinya dari migrasi. Ini dapat mencakup implementasi strategi bantuan luar negeri yang berusaha untuk menopang ekonomi lokal sehingga masyarakat memiliki peluang ekonomi di tanah airnya. Hal ini juga bisa mengharuskan pemerintah dalam menekan kepemimpinan negara lain untuk menghormati hak asasi warga negaranya untuk memaksimalkan kebebasan dan kesempatan. Upaya tersebut akan membantu menciptakan konteks di mana migrasi lebih sering terjadi karena pilihan daripada kebutuhan (Vietti & Scribner, 2013).

Keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa memberi berpengaruh pada kawasan di Eropa. Ada beberapa alasan mengapa Britania Raya keluar dari Uni Eropa, Pertama adalah Britania Raya

yang menginginkan Brexit percaya bahwa kendali Uni Eropa sebagai kawasan begitu besar terhadap dampak kedaulatan Britania Raya. Kedua, pro-Brexit (masyarakat pendukung Brexit) merasa terganggu dengan adanya aturan yang ditetapkan di Brussel, Belgia, markas besar Uni Eropa. Di mana mereka percaya bahwa aturan ini dapat mencegah bisnis beroperasi secara efisien, menyangkut pada perdagangan bebas. Isu migran juga turut menjadi alasan utama yang memicu debat ketiga dan menyebabkan isu Brexit ini memanas. Konsekuensi yang parah juga harus ditanggung oleh negara lain dengan adanya pembaharuan aturan imigrasi. Uni Eropa tidak hanya kehilangan pembayar kontribusi yang besar dari Britania Raya, tetapi hal ini juga berdampak di bidang politik luar negeri, diplomatik serta militer. Selain masalah ekonomi yang dialami oleh negara-negara Anggota Uni Eropa, pelepasan Britania Raya dari Uni Eropa juga turut berdampak pada masalah migrasi di negara-negara Uni Eropa.

Masalah ini memunculkan krisis pengungsi yang jelas merupakan tuntutan bagi benua Eropa. Sikap Eropa ini merupakan bentuk dari peraturan yang telah disepakati di kawasan tersebut terkait Free Movement yakni, imigran tanpa batas dan kemudian didistribusikan ke seluruh negara-negara anggota Uni Eropa, sementara sejumlah anggota Uni Eropa tidak bersedia menerima dan hingga kini masih menjadi kontroversi. Keterkaitan ini juga dimunculkan dari masalah krisis utang negara, dimana penegakan

persatuan Uni Eropa juga malah membuat jurang antar negara yang satu dengan negara yang lain menjadi bertambah besar. Negara kaya anggota merasa disalahgunakan, sedangkan negara miskin merasa dikendalikan.

### **1.2.5 Brexit**

Europe Parliament mengemukakan bahwa Brexit merupakan British-Exit yakni penarikan Britania Raya dari keanggotaan di Uni Eropa. Referendum nasional yang tidak mengikat pada tahun 2016 yang menghasilkan suara Inggris untuk keluar dari Uni Eropa. Brexit ini merupakan dasar sebagai penjelasan perilaku luar negeri Britania Raya. Peran Britania Raya sebagai aktor yang memiliki kedaulatan mengambil keputusan serta memerankan peranan penting dalam pergaulan internasional negaranya bagi masyarakat maupun aturan dalam negerinya.

Konsep Britania Raya keluar dari Uni Eropa (BREXIT) ini diberlakukan sebagai upaya untuk mendapatkan kedaulatan secara penuh dalam membuat dan memberikan aturan negara terhadap negara lain secara penuh. Harapan yang muncul dari Brexit adalah sebagai wujud kepentingan nasional dimana Britania Raya mampu memperbaharui aturan imigrasinya yang berlaku baik bagi negara anggota Uni Eropa maupun negara diluar Uni Eropa. Hal ini juga berlaku pada aturan pajak serta hal lain yang turut berkaitan dengan imigrasi, ekonomi maupun *security* secara independent. Peneliti

memandang bahwa Konsep Brexit ini merupakan bentuk terhadap kepentingan nasional yang sangat penting dalam menjelaskan serta memahami perilaku internasional. Konsep Brexit ini adalah dasar sebagai penjelasan perilaku luar negeri yang dilakukan oleh Britania Raya. Peran Britania Raya sebagai aktor dalam mengambil keputusan serta memerankan peranan penting dalam pergaulan internasionalnya bagi masyarakat dalam negerinya.

Kepentingan nasional sendiri merupakan suatu tindakan yang diambil oleh negara dengan alasan mencapai sebuah tujuan serta sebagai refleksi dalam lingkungan sosial. Jika suatu negara belum mencapai kepentingannya, maka negara tersebut akan memiliki beban secara moral. Oleh karena itu, penting bagi suatu negara untuk berusaha mencapai kepentingan tersebut sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Namun kepentingan suatu negara tidak selamanya harus dapat berjalan sesuai keinginan nasionalnya, diperlukan sebuah kontrol dari pemerintah internasional (Granville, 2005).

Pengertian kepentingan nasional menurut Plano dan Olton dalam buku "International Dictionary": "Kepentingan nasional didefinisikan sebagai suatu tujuan fundamental yang menjadi faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam perumusan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara juga secara khas terdiri dari unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital seperti pertahanan,

keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi” (Plano & Olton, 1982).

### **1.2.6 Aturan Imigrasi Uni Eropa**

Sejak 1992, warga negara anggota Uni Eropa juga memegang “Kewarganegaraan Serikat”. Dimana kewarganegaraan secara tradisional dipahami sebagai status yang mengatur hubungan antara individu dan negara dengan mendefinisikan hak dan kewajiban pemerintah dan warga negara. Bagi sebagian besar warga negara Uni Eropa, mereka yang tinggal di negara kebangsaan mereka, kewarganegaraan Uni Eropa tidak terlalu penting, karena sebagian besar hak dan kewajiban diatur oleh kewarganegaraan nasional. Bagi mereka, kewarganegaraan Uni Eropa hanya memerlukan hak suara untuk Parlemen Eropa dan hak untuk mengajukan petisi kepada Ombudsman Eropa, sedangkan hak tinggal dan hak kewarganegaraan tetap berakar dalam memegang kewarganegaraan negara anggota. Memegang kewarganegaraan Uni Eropa adalah sangat penting untuk warga negara anggota Uni Eropa pindah ke negara anggota lain (bermigrasi): Kewarganegaraan serikat memberi semua warga negara anggota Uni Eropa kebebasan bergerak ke negara anggota lain, hak untuk tinggal (penghasilan sederhana dan kondisi jaminan sosial berlaku), hak atas pekerjaan (kecuali untuk posisi tinggi dalam pegawai negeri), hak atas perlakuan yang sama dengan warga negara dan hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan lokal.

Fungsi utama kewarganegaraan Uni Eropa adalah mendorong migrasi intra-Uni Eropa dengan memperluas hak kewarganegaraan kepada warga negara yang dapat berpindah dari negara anggota, dan dengan demikian dapat dipahami dengan baik sebagai rezim migrasi yang disamakan sebagai kewarganegaraan. Meskipun kebebasan bergerak modal, barang, jasa dan orang merupakan inti dari penyatuan Eropa sejak Perjanjian Roma, awalnya tidak dimaksudkan bahwa kebebasan bergerak akan terbuka untuk semua warga negara dari negara anggota. Pergerakan bebas pekerja memberikan warga negara dari negara-negara anggota UE hak untuk secara bebas memilih tempat kerja mereka di dalam UE. Mereka tidak memerlukan izin kerja dan memiliki akses yang sama untuk pekerjaan di negara anggota lainnya sebagai warga negara dari negara anggota tersebut. Ini berarti bahwa mereka dan anggota keluarganya memiliki hak untuk bertempat tinggal untuk tujuan pekerjaan di negara-negara anggota lainnya. Dalam keputusan hukumnya, Pengadilan Kehakiman Uni Eropa menganggap seseorang sebagai pekerja jika dia melakukan kegiatan yang nyata dan asli untuk orang lain di bawah arahan orang itu dan melakukan layanan dengan imbalan remunerasi.

Mencerminkan kepentingan dominan dalam penciptaan pasar bersama, merupakan awalan pada kebebasan bergerak dibatasi untuk pekerja dan orang-orang yang aktif secara ekonomi. Sudah Traktat Paris (1951), yang menciptakan Komunitas Batubara dan

Baja Eropa (ECSC), menetapkan dalam Pasal 69 bahwa negara-negara anggota wajib menghapus pembatasan berbasis kewarganegaraan pada pekerjaan di sektor batu bara dan baja bagi pekerja yang berkewarganegaraan negara anggota dan mampu membuktikan kualifikasi yang diakui. Ketentuan ini merupakan cetak biru untuk pasal-pasal kebebasan bergerak dari Perjanjian Roma yang membentuk Komunitas Eropa (EC). Menurut Pasal 48, pergerakan bebas bagi pekerja harus ditetapkan sampai 1 Januari 1970. Selain pekerjaan (Pasal 48–51), wirausaha (Pasal 52-58) dan penyediaan layanan (Pasal 58-66) adalah satu-satunya dua jenis kegiatan ekonomi lain yang gerakan bebasnya akan diberikan. Seni. 48 (2) menuntut “penghapusan setiap diskriminasi berdasarkan kebangsaan antara pekerja dari negara-negara anggota sehubungan dengan pekerjaan, remunerasi dan kondisi kerja lainnya.” (Perchinig, n.d.)

Sebaliknya, berbagai forum antar pemerintah yang menangani masalah migrasi dan kontrol perbatasan muncul, di mana negara-negara anggota yang lebih integratif mengatur langkahnya. Konvensi 1990 yang mengimplementasikan Perjanjian Schengen memerlukan berbagai tindakan nyata mengenai harmonisasi peraturan visa dan masuk, kontrol perbatasan eksternal, kerja sama polisi, dan pembentukan sistem informasi bersama dan koordinasi kebijakan suaka. Kerjasama antar pemerintah dalam Komite Ad Hoc yang terkait dengan Dewan, “Kelompok Ad Hoc tentang Suaka dan

Migrasi,” juga menghasilkan “Perjanjian Dublin” (1990) yang mengatur tanggung jawab negara-negara anggota untuk menangani klaim suaka. Forum antar pemerintah lebih lanjut – mis. TREVI: Terrorism, Radicalism, Extremism and Violence International), terutama berurusan dengan kerja sama polisi dan membuka jalan bagi pengembangan “komunitas epistemik” pejabat kementerian dalam negeri yang terkait erat disertai dengan “budaya kerja sama yang saling menguntungkan,”(Perchinig, n.d.).

Jaringan pejabat kementerian dalam negeri yang terhubung erat yang disosialisasikan ke dalam budaya kelembagaan umum yang berfokus pada keamanan dan enggan untuk Eropaisasi bidang kebijakan mereka harus menjadi pemain utama di bidang migrasi kebijakan di masa depan.

### **1.2.7 Foreign Direct Investment**

Investasi asing langsung (FDI) meningkatkan produktivitas nasional dan oleh karena itu output dan. Perusahaan multinasional membawa pengetahuan teknologi dan manajerial yang lebih baik, yang secara langsung meningkatkan output dalam operasi mereka. FDI juga mendorong perusahaan domestik untuk meningkatkan manajerialnya misalnya, melalui rantai pasokan yang lebih kuat dan persaingan yang lebih ketat.

Britania Raya memiliki saham FDI lebih dari £1 triliun, sekitar setengahnya berasal dari anggota lain dari Uni Eropa (UE).

Bagian dari daya tarik Britania Raya bagi investor asing adalah yang membawa akses mudah ke Pasar Tunggal Uni Eropa. Setelah Brexit, biaya perdagangan lebih tinggi dengan Uni Eropa yang kemungkinan akan menekan FDI.

Secara keseluruhan, Brexit kemungkinan akan berdampak negatif pada FDI ke dalam, karena Britania Raya keluar dari Uni Eropa akan mengurangi arus masuk FDI ke Britania Raya sekitar 22%. Kerugian investasi seperti itu akan merusak produktivitas Britania Raya dan dapat menurunkan pendapatan riil sebesar 3,4%. Hal ini lebih besar dari perkiraan tentang kerugian pendapatan statis dari perdagangan, yang rata-rata 2,6% di bawah 'skenario pesimistis' kami (Dhingra et al., 2016)

### **2.3 Argumentasi Utama**

Berdasarkan kerangka konseptual diatas, maka penulis merumuskan argumentasi utama sebagai landasan penulis dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut: **“Brexit berdampak terhadap perubahan aturan imigrasi yang melingkupi Visa dan Izin Tinggal di Britania Raya bagi investasi asing, yang mengatur ketentuan pada perizinan perjalanan bisnis dan aturan pembatasan pekerja asing.”**

## 2.4 Verifikasi Variabel dan Indikator Tabel

Tabel 1. Verifikasi Variabel dan Indikator

Variabel Dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisa)
Variabel Bebas: Brexit berdampak terhadap perubahan aturan imigrasi yang melingkupi Visa dan Izin Tinggal di Britania Raya bagi investasi asing.	1. Referendum Brexit	<p>1. Imigrasi adalah faktor utama dalam referendum Brexit pada tahun 2016. Kekhawatiran masyarakat dan pemerintah Britain Exit tentang masalah ini adalah salah satu alasan utama mengapa David Cameron terpaksa mengadakan pemungutan suara penting pada bulan Juni 2016, dan hal ini kemudian menjadi subjek sangat penting selama kampanye Britain Exit.</p> <p>Namun, lima tahun telah berlalu sejak referendum berlangsung dan akan adil untuk mengatakan bahwa perdebatan imigrasi dalam politik Britania Raya menjadi hal terpenting pada keputusan ini.</p> <p>Jadi, seperti yang telah disebutkan di</p>

	<p>2. Konstitusi Brexit</p>	<p>atas, Britania sekarang harus merancang sistem imigrasi pasca-Brexitnya sendiri. Tetapi sementara itu, ia juga mengetahui bahwa dua faktor utama berubah dalam perdebatan imigrasi. Ada tren jumlah migrasi bersih. Pada Juni 2016, ketika referendum berlangsung, migrasi bersih ke Inggris mencapai rekor 333.000 orang sepanjang masa. (Data atau fakta: Buku Brexit and Migration)</p> <p>2. Pergerakan bebas dengan Uni Eropa (UE) berakhir pada 31 Desember 2020 dan ada pengaturan baru untuk warga negara Uni Eropa. Warga negara Irlandia dapat terus masuk, tinggal, dan bekerja dengan bebas di Inggris. Namun negara-negara anggota lainnya sedang berusaha untuk bernegosiasi dengan Uni Eropa.</p> <p>Terdapat perubahan baru pada:</p>
--	---------------------------------	--

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses aplikasi visa</li> <li>2. Warga negara khusus UE, EEA, dan Swiss</li> <li>3. Negara non-Uni Eropa</li> <li>4. Pekerja berskill tinggi</li> <li>5. Skema bakat global</li> <li>6. Pelajar Internasional</li> <li>7. Izin tinggal menikah</li> </ol> <p>Fakta dan Data dapat ditemukan di:</p> <p><a href="https://www.gov.uk/guidance/new-immigration-system-what-you-need-to-know">https://www.gov.uk/guidance/new-immigration-system-what-you-need-to-know</a>)</p>
	<p>3. Visa bagi Investor Asing</p>	<p>3. Investor asing harus memiliki setidaknya £2.000.000 dana investasi untuk mengajukan permohonan visa Tier 1 (Investor).</p> <p>Dengan kualifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Berusia 18 tahun ke atas untuk mengajukan visa ini</li> <li>2) Dapat membuktikan bahwa uang itu milik investor yang melakukan pengajuan atau</li> </ol>

		<p>suami, istri, pasangan yang belum menikah atau sesama jenis</p> <p>3) Telah membuka rekening di bank yang diatur oleh Britania Raya untuk digunakan dalam penyimpanan dana investasi.</p> <p><b>Dana investasi harus:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Diselenggarakan di satu atau lebih lembaga keuangan yang diatur secara gratis untuk dibelanjakan ('sekali pakai') di Britania Raya</li><li>• Uang investasi bisa berada di Britania Raya atau di luar negeri investor mengajukan visa.</li></ul> <p>Sumber: <a href="https://www.gov.uk/tier-1-investor/eligibility">https://www.gov.uk/tier-1-investor/eligibility</a></p>
--	--	--

<p>Variabel Terikat: Yang mengatur ketentuan pada perizinan perjalanan bisnis dan pembatasan pekerja asing.</p>	<p>1. Adanya perubahan aturan perjalanan bisnis ke Britania Raya.</p>	<p>1. Perubahan aturan dan perjalanan bisnis ke Britania Raya bagi masyarakat Uni Eropa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Warga Negara anggota Uni Eropa, EEA, atau Swiss yang bepergian ke Inggris Raya untuk perjalanan bisnis singkat, Anda mungkin tidak perlu mengajukan permohonan visa.</li> <li>2) Di bawah sistem imigrasi berbasis poin perubahan aturan di Britania Raya yang baru, masyarakat UE dapat terus mengunjungi Inggris tanpa mengajukan permohonan visa. Dalam kebanyakan kasus, pebisnis asal UE dapat tinggal hingga 6 bulan. Dapat berpartisipasi dalam berbagai aktivitas termasuk aktivitas terkait bisnis seperti rapat, acara, dan konferensi. Dapat</li> </ol>
---	---	---

		<p>memasuki Inggris Raya beberapa kali selama periode tersebut, tetapi pebisnis tidak diperkenankan tinggal di Britania Raya melalui kunjungan yang sering atau berturut-turut.</p> <p>Larangan bagi pengunjung bisnis:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Melakukan pekerjaan berbayar atau tidak dibayar untuk perusahaan Britania Raya atau sebagai wiraswasta</li><li>2) Melakukan penempatan kerja atau magang.</li><li>3) Menjual langsung kepada publik atau menyediakan barang dan jasa</li><li>4) Britania Raya mengganti pergerakan bebas masuk bagi imigran Uni Eropa dengan sistem berbasis poin Inggris untuk memenuhi pekerja yang paling terampil, pelajar serta berbagai</li></ol>
--	--	--

	<p>2. Adanya aturan pembatasan Pekerja Asing</p>	<p>rute kerja spesialis lainnya termasuk rute untuk para pemimpin global dan inovator.</p> <p>Fakta dan Data dapat dilihat di: <a href="https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-as-an-eu-eea-or-swiss-citizen">https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-as-an-eu-eea-or-swiss-citizen</a></p> <p>2. Aturan pembatasan Pekerja Asing di Uni Eropa Pasca Brexit</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Britania Raya tidak akan memperkenalkan rute kerja umum berketerampilan rendah atau sementara.</li> <li>2. Britania perlu mengalihkan fokus ekonomi negaranya dari ketergantungan pada tenaga kerja murah dari Eropa dan sebaliknya berkonsentrasi pada investasi di bidang teknologi dan otomatisasi.</li> <li>3. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat lokal akan ancaman</li> </ol>
--	--	---

		<p>dari imigran asing yang tidak terseleksi dengan ketat seperti terjadinya terorisme (masuknya ISIS)</p> <p>Fakta dan Data dapat dilihat di:</p> <p><a href="https://ukandeu.ac.uk/uk-constitution-after-brexit/">https://ukandeu.ac.uk/uk-constitution-after-brexit/</a></p>
--	--	--

## 2.5 Skema Penelitian

